

## IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM KEGIATAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DI KELURAHAN CAMPAGO IPUH, KOTA BUKITTINGGI

Dewi Ramadhani<sup>1\*</sup>, Aditya Cahya Ramadhiawan<sup>2</sup> Tri Yuniningsih<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Magister Administrasi Publik, Fakultas FISIP Universitas Diponegoro

Email: [dewiramadhani2@students.undip.ac.id](mailto:dewiramadhani2@students.undip.ac.id)<sup>1\*</sup>, [adityacahyar@students.undip.ac.id](mailto:adityacahyar@students.undip.ac.id)<sup>2</sup> tri  
[yuniningsih@lecturer.undip.ac.id](mailto:yuniningsih@lecturer.undip.ac.id)<sup>3</sup>

### **Abstract**

*Gender mainstreaming is an important strategy in development, yet its implementation at the grassroots level still faces various challenges. This study aims to analyze the implementation of gender mainstreaming in the activities of Joint Business Groups (KUBE) in Campago Ipuh Village, Bukittinggi City. The research employed a descriptive qualitative approach using George C. Edwards III's policy implementation theory as the analytical framework. The findings indicate that gender mainstreaming implementation has been carried out at the level of women's participation as productive economic actors, but has not been optimal in comprehensively integrating gender equality principles. Based on Edwards III's four variables, communication is effective for operational information but does not include socialization of gender equality values, resources are still limited in terms of capital and sustainable training, implementer disposition shows high motivation but low gender awareness, and bureaucratic structure has not been equipped with rules ensuring role equality. The main inhibiting factors are the lack of gender-responsive training, insufficient understanding of gender mainstreaming concepts, and implementation dependence on individual initiatives. This study recommends the need for capacity strengthening through structured training, formulation of gender-responsive technical guidelines, and development of internal group rules ensuring women's equal participation in decision-making.*

**Keywords:** *gender mainstreaming, women empowerment, KUBE, policy implementation, Bukittinggi.*

### **Abstrak**

Pengarusutamaan gender merupakan strategi penting dalam pembangunan, namun implementasinya di tingkat grassroots masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengarusutamaan gender dalam kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Campago Ipuh, Kota Bukittinggi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengarusutamaan gender telah berjalan pada tingkat partisipasi perempuan sebagai pelaku ekonomi produktif, namun belum optimal dalam mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender secara komprehensif. Berdasarkan empat variabel Edwards III, komunikasi sudah efektif untuk informasi operasional tetapi belum mencakup sosialisasi nilai kesetaraan gender, sumber daya masih terbatas dalam hal modal dan pelatihan berkelanjutan, disposisi pelaksana menunjukkan motivasi tinggi namun kesadaran gender rendah, dan struktur birokrasi belum dilengkapi aturan yang menjamin kesetaraan peran. Faktor penghambat utama adalah minimnya pelatihan responsif gender, kurangnya pemahaman konsep pengarusutamaan gender, serta ketergantungan implementasi pada inisiatif individu. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas melalui pelatihan terstruktur, penyusunan pedoman teknis responsif gender, dan pengembangan aturan internal kelompok yang menjamin partisipasi setara perempuan dalam pengambilan keputusan.

**Kata kunci:** pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, KUBE, implementasi kebijakan, Bukittinggi.

## Pendahuluan

Isu kesetaraan gender merupakan salah satu agenda penting dalam pembangunan nasional dan daerah di Indonesia. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi kesenjangan gender, ketimpangan antara laki-laki dan perempuan masih terlihat di berbagai sektor kehidupan. Badan Pusat Statistik (2024) mencatat bahwa Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 0,421 dari 0,447 pada tahun 2023. Penurunan IKG ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam upaya mengurangi kesenjangan gender, namun angka tersebut juga menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan signifikan yang harus diatasi, terutama dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar kerja. Di sisi lain, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia menunjukkan tren positif dengan mencapai 76,90 pada tahun 2023, meningkat 0,4% dari tahun sebelumnya yang sebesar 76,59 (Badan Pusat Statistik, 2023). Peningkatan IDG mencerminkan semakin meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan publik. Namun demikian, capaian ini belum merata di seluruh wilayah Indonesia dan masih memerlukan intervensi kebijakan yang lebih komprehensif untuk memastikan perempuan memiliki akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan kesempatan kerja.

Ketimpangan gender berdampak langsung terhadap pembangunan ekonomi dan sosial, terutama dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Abdurrahman dan Tusianti (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa meskipun telah ada berbagai program pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi dan politik, upaya tersebut belum sepenuhnya mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan Indonesia secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang ada masih memerlukan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan agar dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup perempuan. Perempuan, khususnya yang berada di kelompok ekonomi menengah ke bawah, sering kali menghadapi hambatan struktural seperti keterbatasan akses terhadap modal usaha, minimnya pelatihan keterampilan, rendahnya posisi tawar dalam pengambilan keputusan ekonomi rumah tangga, serta kurangnya dukungan sosial dan kelembagaan. Kondisi ini menyebabkan perempuan kesulitan untuk berpartisipasi secara optimal dalam kegiatan ekonomi produktif, padahal mereka memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan jika diberikan akses, kesempatan, dan dukungan yang setara.

Pengarusutamaan gender (PUG) menjadi strategi kunci yang diadopsi pemerintah Indonesia untuk mengatasi ketimpangan gender dalam pembangunan. Rahayu (2016) mendefinisikan pengarusutamaan gender sebagai strategi pembangunan yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kesamaan akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat terhadap hasil pembangunan bagi perempuan dan laki-laki. Strategi ini telah diadopsi dalam berbagai kebijakan dan program pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, sebagai upaya untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan publik. Kementerian Keuangan RI (2022) dalam kajiannya menekankan bahwa analisis ketimpangan gender yang komprehensif sangat penting sebagai dasar penyusunan strategi pengarusutamaan gender yang efektif di Indonesia, terutama dalam mengidentifikasi kesenjangan yang terjadi di berbagai sektor dan wilayah. Namun, penerapan PUG di tingkat implementasi masih menghadapi berbagai hambatan. Muhartono (2020) menjelaskan bahwa regulasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah tidak hanya memerlukan kebijakan formal yang tertuang dalam peraturan daerah, tetapi juga membutuhkan komitmen institusional yang kuat, alokasi anggaran yang memadai, serta pemahaman yang mendalam terhadap isu gender dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk aparat pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat itu sendiri. Nurdin, Syahrir, dan Akbar (2024) menambahkan bahwa hambatan pengarusutamaan gender di Indonesia pasca era reformasi masih bersumber dari faktor sosial

budaya yang patriarkis, lemahnya kapasitas kelembagaan, serta minimnya data terpilah gender yang dapat digunakan untuk menyusun kebijakan berbasis bukti.

Dalam konteks pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Barat, khususnya Kota Bukittinggi, peran perempuan sangat penting terutama dalam mendukung perekonomian keluarga melalui kegiatan usaha kecil dan menengah. Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi (2024) dalam Profil Gender dan Anak Kota Bukittinggi Tahun 2024 melaporkan bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Bukittinggi mengalami perkembangan positif dari tahun 2020 hingga 2023. Capaian ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mengurangi kesenjangan gender di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi melalui berbagai program dan kebijakan yang responsif gender. Kota Bukittinggi, sebagai salah satu pusat ekonomi, pendidikan, dan pariwisata di Sumatera Barat, memiliki potensi besar dalam mengembangkan kegiatan ekonomi kreatif dan sosial berbasis masyarakat. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Bukittinggi membuka peluang bagi perempuan untuk terlibat dalam berbagai aktivitas produktif, mulai dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga jasa pariwisata. Namun, partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif masih terkendala oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan modal usaha, minimnya akses terhadap pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha, kurangnya jaringan pemasaran, serta rendahnya integrasi prinsip kesetaraan gender dalam program pemberdayaan ekonomi lokal. Marwanti dan Astuti (2018) dalam penelitiannya di Kabupaten Karanganyar menunjukkan bahwa model pemberdayaan perempuan miskin melalui pengembangan kewirausahaan keluarga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara signifikan, terutama ketika program tersebut dirancang dengan pendekatan ekonomi kreatif yang sesuai dengan potensi dan karakteristik lokal.

Salah satu program pemberdayaan yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan partisipasi perempuan di bidang ekonomi adalah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang difasilitasi oleh Dinas Sosial. KUBE merupakan program pemerintah yang berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial RI, khususnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan memberdayakan kelompok masyarakat miskin melalui pemberian modal usaha untuk mengelola Usaha Ekonomi Produktif (UEP) (Kementerian Sosial RI, 2024). Program KUBE dirancang dengan pendekatan kelompok untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan kapasitas manajemen usaha, serta memfasilitasi akses terhadap sumber daya ekonomi bagi masyarakat prasejahtera. Firman, Dirwan, dan Mariah (2020) dalam penelitiannya di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa menemukan bahwa program KUBE memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha yang berkelanjutan. Yasin (2015) juga menegaskan bahwa KUBE merupakan upaya strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat karena program ini tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan modal, tetapi juga pada penguatan kapasitas kelompok dalam mengelola usaha secara mandiri dan berkelanjutan.

KUBE menjadi wadah bagi masyarakat, khususnya perempuan, untuk mengembangkan usaha produktif berbasis komunitas. Yuniawati, Rahmawati, dan Susilowati (2021) menjelaskan bahwa melalui program pemberdayaan kelompok seperti KUBE, perempuan tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi rumah tangga, tetapi juga sebagai agen sosial yang dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Lubis, Winata, dan Siregar (2024) dalam penelitian tentang pengembangan usaha melalui KUBE produsen tape di Medan Tuntungan menunjukkan bahwa pendekatan KUBE dengan tahapan formasi kelompok, bimbingan teknis, monitoring berkala, dan evaluasi partisipatif dapat meningkatkan motivasi anggota, kemampuan implementasi usaha di lapangan, serta kapasitas kepengurusan dalam mengelola KUBE secara efektif. Selain itu, KUBE juga memberikan ruang bagi perempuan untuk mengembangkan keterampilan sosial, memperluas jaringan ekonomi, serta meningkatkan posisi tawar dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat keluarga maupun komunitas.

Di Kelurahan Campago Ipuh, Kota Bukittinggi, terdapat beberapa kelompok KUBE yang telah dibentuk dan difasilitasi oleh Dinas Sosial Kota Bukittinggi. Kegiatan KUBE di kelurahan ini berfokus

pada usaha kuliner rumahan yang memanfaatkan potensi lokal seperti pengolahan makanan tradisional Minangkabau, kerajinan tangan berbasis seni dan budaya lokal, serta pengolahan produk pertanian dan perkebunan yang memiliki nilai jual tinggi. Anggota KUBE di Kelurahan Campago Ipuh sebagian besar adalah perempuan yang berasal dari keluarga prasejahtera dan memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Melalui program KUBE, mereka mendapatkan bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan produksi, serta pendampingan dalam pengembangan usaha. Namun, observasi awal menunjukkan bahwa penerapan prinsip pengarusutamaan gender dalam kegiatan KUBE di Kelurahan Campago Ipuh masih belum optimal. Beberapa isu yang teridentifikasi antara lain adalah minimnya akses perempuan anggota KUBE terhadap pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha yang berkualitas, terbatasnya keterlibatan perempuan dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan kelompok, kurangnya pembagian peran yang adil antara anggota laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan usaha, serta belum optimalnya mekanisme monitoring dan evaluasi yang sensitif gender dalam pelaksanaan program KUBE.

Beberapa studi terkini menunjukkan pentingnya integrasi prinsip kesetaraan gender dan teknologi digital dalam program pemberdayaan perempuan. Veranita (2023) dalam penelitiannya tentang pemberdayaan pelaku UMKM perempuan mengidentifikasi bahwa pelatihan digital marketing dapat meningkatkan ketahanan ekonomi perempuan pelaku UMKM melalui perluasan jangkauan pasar, diversifikasi produk, dan peningkatan omzet penjualan. Wibawa (2023) menekankan pentingnya pelatihan mindset kewirausahaan dan literasi digital untuk meningkatkan daya saing pengusaha perempuan di era ekonomi digital. Ratnasari, Supriatna, dan Sadikin (2021) menemukan bahwa pemberdayaan perempuan melalui pelatihan kewirausahaan, seperti pelatihan menjahit dan desain busana, dapat meningkatkan kemandirian ekonomi dan kemampuan perempuan dalam mengembangkan usaha mandiri yang berkelanjutan. Kertati (2021) dalam analisisnya tentang Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Surakarta menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan yang efektif memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup pelatihan keterampilan teknis dan manajerial, akses terhadap permodalan dengan syarat yang fleksibel, serta dukungan kebijakan yang responsif gender dan berkelanjutan.

Pemerintah Kota Bukittinggi telah menunjukkan komitmennya dalam implementasi pengarusutamaan gender melalui berbagai program dan kebijakan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi menyelenggarakan Pelatihan Advokasi dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) pada bulan September 2025 sebagai tindak lanjut dari evaluasi penyelenggaraan PUG tahun 2024 dan persiapan penilaian Penganugerahan Parahita Ekapraya tahun 2025 (Dutametro, 2025). Kegiatan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kesadaran dan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas implementasi PUG di berbagai sektor pembangunan. Namun, komitmen di tingkat kebijakan belum tentu terefleksikan secara optimal dalam implementasi program di tingkat bawah, khususnya dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti KUBE. Oleh karena itu, penelitian tentang implementasi pengarusutamaan gender dalam kegiatan KUBE di Kelurahan Campago Ipuh menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan dan praktik, serta untuk merumuskan strategi penguatan implementasi PUG yang lebih efektif di tingkat komunitas.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi pengarusutamaan gender dalam kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Campago Ipuh, Kota Bukittinggi. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan tentang praktik pengarusutamaan gender di tingkat komunitas, khususnya dalam konteks program pemberdayaan ekonomi berbasis kelompok. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya literatur tentang implementasi kebijakan pengarusutamaan gender, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi

kebijakan dan strategi penguatan program KUBE yang lebih responsif gender dan berkelanjutan bagi Pemerintah Kota Bukittinggi dan pemangku kepentingan lainnya.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami secara mendalam implementasi pengarusutamaan gender dalam kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Campago Ipuh, Kota Bukittinggi. Teori implementasi kebijakan Edward III digunakan sebagai kerangka analisis, yang menyoroti empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Penelitian dilakukan di Kelurahan Campago Ipuh yang dipilih secara purposif karena memiliki KUBE aktif dan melibatkan perempuan sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi. Informan penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling, terdiri atas anggota KUBE, pengurus KUBE, dan pendamping sosial dari Kelurahan Campago Ipuh yang memahami pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan di wilayah tersebut.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi tentang bentuk pelaksanaan, hambatan, dan dukungan terhadap penerapan prinsip pengarusutamaan gender. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan empat variabel Edward III. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran menyeluruh mengenai implementasi pengarusutamaan gender dalam kegiatan KUBE di tingkat lokal.

### **Hasil dan Pembahasan**

Penelitian ini dilakukan terhadap anggota, pengurus, dan pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Campago Ipuh, Kota Bukittinggi. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan observasi partisipatif yang dilakukan terhadap 10 informan, diperoleh data mengenai implementasi pengarusutamaan gender dalam kegiatan KUBE yang dianalisis menggunakan empat variabel Edwards III (1980), yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

#### **1. Komunikasi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antaranggota dan pengurus KUBE berjalan melalui dua saluran utama, yaitu rapat kelompok yang dilaksanakan sebulan sekali dan media komunikasi daring melalui grup WhatsApp. Informasi yang dikomunikasikan mencakup jadwal kegiatan produksi, pembagian tugas, pembagian hasil usaha, dan rencana pengembangan usaha. Pendamping sosial dari Dinas Sosial Kota Bukittinggi berperan sebagai koordinator yang menyampaikan informasi program dari pemerintah kepada kelompok dan melaporkan perkembangan kegiatan KUBE kepada pihak kelurahan dan dinas terkait. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa komunikasi yang terjadi masih berfokus pada aspek operasional dan teknis kegiatan usaha, sementara informasi mengenai prinsip pengarusutamaan gender, kesetaraan peran, dan pemberdayaan perempuan secara khusus belum menjadi bagian dari agenda komunikasi kelompok.

#### **2. Sumber Daya**

Dari aspek sumber daya manusia, anggota KUBE di Kelurahan Campago Ipuh sebagian besar adalah perempuan usia produktif (25-45 tahun) dengan latar belakang pendidikan menengah (SMP dan SMA). Dari 15 anggota KUBE yang aktif, 13 orang adalah perempuan. Modal usaha KUBE diperoleh dari dua sumber, yaitu bantuan stimulan dari pemerintah melalui Dinas Sosial sebesar Rp 15.000.000. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelatihan peningkatan kapasitas kewirausahaan dan manajemen usaha belum dilaksanakan

secara rutin dan terstruktur. Pelatihan yang pernah diberikan hanya pada saat awal pembentukan KUBE dan bersifat umum, belum secara spesifik membahas penguatan kapasitas perempuan atau prinsip kesetaraan gender dalam pengelolaan usaha.

3. Disposisi Pelaksana

Anggota KUBE menunjukkan antusiasme dan motivasi yang tinggi dalam menjalankan kegiatan usaha karena adanya manfaat ekonomi berupa tambahan penghasilan keluarga dan manfaat sosial berupa perluasan jaringan dan penguatan solidaritas kelompok. Pengurus KUBE, yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, semuanya adalah perempuan yang aktif mengatur jadwal produksi, mengelola keuangan kelompok, dan membagi hasil usaha sesuai dengan kontribusi kerja masing-masing anggota. Pendamping sosial memberikan arahan administratif, motivasi, dan dukungan agar kegiatan berjalan konsisten dan sesuai dengan pedoman program KUBE dari Kementerian Sosial. Hasil wawancara menunjukkan bahwa anggota dan pengurus KUBE memiliki komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan kelompok dan kesejahteraan bersama. Karena seluruh anggota KUBE adalah perempuan, kegiatan kelompok secara alami memberikan ruang penuh bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam semua aspek kegiatan, mulai dari produksi, pengelolaan keuangan, hingga pengambilan keputusan. Tidak terdapat hambatan gender dalam hal akses terhadap kepemimpinan atau partisipasi dalam pengambilan keputusan kelompok.

4. Struktur Birokrasi

KUBE di Kelurahan Campago Ipuh memiliki struktur organisasi yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Tugas dan tanggung jawab dibagi berdasarkan kesepakatan bersama dalam rapat kelompok. Ketua bertanggung jawab terhadap koordinasi kegiatan dan representasi kelompok, sekretaris mengelola administrasi dan surat-menyurat, bendahara mengelola keuangan, dan anggota melaksanakan kegiatan produksi. Pelaporan kegiatan dilakukan secara periodik setiap tiga bulan kepada pendamping sosial dalam bentuk laporan tertulis yang mencakup perkembangan usaha, realisasi anggaran, dan kendala yang dihadapi. Karena seluruh anggota dan pengurus KUBE adalah perempuan, tidak terdapat hambatan struktural terkait akses perempuan terhadap posisi kepemimpinan atau pengambilan keputusan dalam kelompok. Ketua, sekretaris, dan bendahara semuanya adalah perempuan yang dipilih berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan anggota. Struktur organisasi yang ada berjalan dengan baik dan memberikan ruang partisipasi yang setara bagi seluruh anggota perempuan dalam pengelolaan kelompok, tanpa adanya dominasi atau eksklusivitas berbasis gender.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengarusutamaan gender dalam kegiatan KUBE di Kelurahan Campago Ipuh memiliki karakteristik yang unik karena seluruh anggota kelompok adalah perempuan. Kondisi ini memberikan implikasi yang berbeda terhadap implementasi pengarusutamaan gender dibandingkan dengan kelompok usaha yang beranggotakan campuran laki-laki dan perempuan. Temuan ini akan dibahas dengan membandingkannya terhadap teori implementasi kebijakan Edwards III (1980) dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan.

Dari aspek komunikasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa aliran informasi antara anggota, pengurus, dan pendamping sosial sudah cukup efektif dalam konteks operasional, namun belum mencakup komunikasi strategis untuk memperkuat pemahaman terhadap konsep pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam konteks pembangunan ekonomi yang lebih luas. Temuan ini sejalan dengan teori Edwards III (1980) yang menyatakan bahwa komunikasi yang efektif dalam implementasi kebijakan tidak hanya mencakup transmisi informasi operasional, tetapi juga kejelasan dan konsistensi pesan mengenai nilai-nilai dan tujuan kebijakan kepada pelaksana. Rahayu (2016) dalam penelitiannya tentang pengarusutamaan gender dalam kebijakan publik di Provinsi Jawa Tengah juga menemukan bahwa komunikasi merupakan aspek kritis karena menentukan sejauh mana nilai-nilai kesetaraan gender dapat dipahami dan diinternalisasi oleh pelaksana kebijakan. Dalam konteks KUBE di Campago Ipuh, meskipun komunikasi operasional

berjalan lancar, komunikasi mengenai pentingnya peran strategis perempuan dalam pembangunan ekonomi, pengembangan kapasitas kewirausahaan, dan pemberdayaan perempuan sebagai agen perubahan sosial masih belum menjadi prioritas. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun KUBE telah memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi, komunikasi strategis yang dapat memperkuat kesadaran dan kapasitas perempuan sebagai pelaku pembangunan masih perlu ditingkatkan. Hal ini menjadi penting agar perempuan tidak hanya menjadi pelaku ekonomi, tetapi juga memahami peran strategis mereka dalam konteks pembangunan yang lebih luas dan memiliki visi jangka panjang untuk pengembangan usaha.

Dalam aspek sumber daya, temuan penelitian ini memperkuat argumen Edwards III (1980) bahwa keterbatasan sumber daya baik dalam bentuk modal, fasilitas, maupun kapasitas manusia menjadi penghambat utama dalam implementasi kebijakan. Keterbatasan modal usaha, peralatan produksi yang sederhana, dan minimnya pelatihan kewirausahaan yang berkelanjutan menghambat peningkatan kapasitas perempuan anggota KUBE dalam mengembangkan usaha yang lebih inovatif dan berdaya saing. Temuan ini sejalan dengan penelitian Marwanti dan Astuti (2018) di Kabupaten Karanganyar yang menemukan bahwa keberhasilan pemberdayaan perempuan miskin melalui kewirausahaan keluarga sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya berupa modal, pelatihan, dan pendampingan yang konsisten. Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Veranita (2023) dan Wibawa (2023) yang menekankan pentingnya pelatihan digital marketing dan mindset kewirausahaan untuk meningkatkan daya saing perempuan pelaku UMKM. Namun, perbedaan dengan penelitian-penelitian tersebut adalah bahwa KUBE di Campago Ipuh belum mengintegrasikan teknologi digital dalam kegiatan pemasaran dan pengelolaan usaha, sehingga potensi pengembangan usaha masih terbatas pada pasar lokal dengan metode pemasaran konvensional. Lubis, Winata, dan Siregar (2024) dalam penelitiannya tentang KUBE produsen tape di Medan Tuntungan juga menemukan bahwa pendampingan yang konsisten dan pelatihan yang terstruktur sangat penting untuk meningkatkan kapasitas pengelola KUBE. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya tidak hanya berdampak pada produktivitas ekonomi, tetapi juga pada terbatasnya kapasitas perempuan untuk mengembangkan inovasi produk, memperluas jaringan pemasaran, dan meningkatkan daya saing usaha dalam pasar yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, dukungan sumber daya yang berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan dan pengembangan KUBE di masa mendatang.

Pada aspek disposisi pelaksana, temuan penelitian ini sejalan dengan teori Edwards III (1980) yang menyatakan bahwa sikap dan komitmen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi efektivitas implementasi. Anggota KUBE menunjukkan motivasi tinggi dan komitmen kuat dalam menjalankan kegiatan usaha, yang tercermin dari keaktifan mereka dalam produksi, pengelolaan keuangan, dan pengambilan keputusan kelompok. Karena seluruh anggota KUBE adalah perempuan, tidak terdapat hambatan gender dalam hal akses terhadap kepemimpinan atau partisipasi dalam pengambilan keputusan. Semua posisi pengurus, mulai dari ketua, sekretaris, hingga bendahara, diisi oleh perempuan yang dipilih berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan anggota. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Yuniawati, Rahmawati, dan Susilowati (2021) yang menemukan bahwa pemberdayaan perempuan melalui kelompok usaha dapat meningkatkan peran perempuan sebagai agen sosial dan pengambil keputusan. Disposisi yang positif dari anggota KUBE perempuan menunjukkan bahwa ketika perempuan diberikan ruang dan kesempatan yang setara tanpa hambatan gender, mereka mampu menunjukkan komitmen dan kapasitas yang tinggi dalam mengelola usaha produktif. Temuan ini memperkuat argumen bahwa disposisi pelaksana yang positif merupakan modal penting dalam implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan. Dalam konteks KUBE yang seluruhnya beranggotakan perempuan, aspek disposisi pelaksana telah berjalan dengan baik karena tidak ada disparitas gender dalam hal motivasi, akses, atau kesempatan berpartisipasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan ruang khusus bagi perempuan dapat menjadi strategi efektif untuk memfasilitasi partisipasi penuh perempuan dalam

kegiatan ekonomi produktif tanpa hambatan struktural atau budaya yang sering muncul dalam kelompok campuran.

Dari aspek struktur birokrasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa KUBE memiliki struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas spesifik untuk ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota, serta mekanisme pelaporan periodik setiap tiga bulan kepada pendamping sosial. Struktur ini sejalan dengan argumen Edwards III (1980) bahwa kejelasan prosedur operasional standar dan pembagian tugas merupakan elemen penting dalam implementasi kebijakan yang efektif. Karena seluruh anggota dan pengurus KUBE adalah perempuan, struktur organisasi yang ada secara alami telah responsif terhadap partisipasi perempuan dalam semua posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Tidak ada hambatan struktural yang membatasi akses perempuan terhadap posisi ketua, sekretaris, atau bendahara, karena memang semua posisi tersebut diisi oleh perempuan berdasarkan kesepakatan kelompok. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahayu (2016) yang menekankan pentingnya kelembagaan yang responsif gender, dan dalam konteks KUBE Campago Ipuh, responsivitas gender terwujud secara praktis karena komposisi anggota yang homogen perempuan. Struktur birokrasi KUBE berfungsi dengan baik dalam memfasilitasi partisipasi setara seluruh anggota perempuan, dengan mekanisme pembagian tugas, koordinasi, dan pelaporan yang jelas dan teratur. Temuan ini menunjukkan bahwa ketika struktur organisasi memberikan ruang penuh bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam semua level kepemimpinan dan pengambilan keputusan tanpa adanya dominasi atau pembatasan berbasis gender, implementasi pemberdayaan ekonomi perempuan dapat berjalan efektif. Dalam konteks ini, aspek struktur birokrasi telah berjalan dengan baik dan mendukung implementasi pengarusutamaan gender secara praktis melalui partisipasi penuh perempuan dalam pengelolaan kelompok. Hal ini berbeda dengan temuan pada kelompok usaha campuran di mana sering kali masih terdapat hambatan struktural atau budaya yang membatasi akses perempuan terhadap posisi kepemimpinan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperkuat teori implementasi kebijakan Edwards III (1980) bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada keempat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Penelitian ini juga memperkuat temuan-temuan sebelumnya dari Rahayu (2016), Marwanti dan Astuti (2018), Veranita (2023), dan Wibawa (2023) mengenai pentingnya komunikasi strategis, sumber daya yang memadai, disposisi pelaksana yang positif, dan dukungan kelembagaan dalam implementasi pengarusutamaan gender. Temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa dalam konteks KUBE yang seluruhnya beranggotakan perempuan, aspek disposisi pelaksana dan struktur birokrasi telah berjalan dengan baik karena tidak ada disparitas gender dalam hal motivasi, akses kepemimpinan, atau pengambilan keputusan. Perempuan memiliki ruang penuh untuk berpartisipasi aktif dalam semua level organisasi, dari anggota hingga pengurus, dengan struktur yang jelas dan mekanisme yang teratur. Namun, implementasi pengarusutamaan gender masih menghadapi tantangan signifikan pada aspek komunikasi dan sumber daya. Komunikasi masih berfokus pada aspek operasional dan belum menyentuh sosialisasi nilai kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan secara strategis, sementara keterbatasan sumber daya baik modal, peralatan, maupun pelatihan berkelanjutan menghambat pengembangan kapasitas perempuan dalam kewirausahaan, inovasi produk, dan daya saing usaha. Temuan baru dari penelitian ini adalah bahwa meskipun komposisi kelompok yang homogen perempuan menghilangkan hambatan struktural dan disposisional berbasis gender, keberhasilan pemberdayaan ekonomi perempuan tetap memerlukan dukungan komunikasi yang efektif dan sumber daya yang memadai untuk meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa pengarusutamaan gender di tingkat grassroots tidak hanya tentang memastikan partisipasi perempuan, tetapi juga tentang menyediakan dukungan sistematis yang memungkinkan perempuan untuk mengembangkan potensi penuh mereka dalam kegiatan ekonomi produktif.

## **Simpulan dan Saran**

### **Simpulan**

Implementasi pengarusutamaan gender dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Campago Ipuh, Kota Bukittinggi telah berjalan dengan baik pada aspek disposisi pelaksana dan struktur birokrasi. Karena seluruh anggota KUBE adalah perempuan, tidak terdapat hambatan gender dalam hal akses terhadap kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan partisipasi dalam pengelolaan kelompok. Perempuan memiliki ruang penuh untuk berperan aktif dalam semua level organisasi, dari anggota hingga pengurus (ketua, sekretaris, bendahara), dengan motivasi dan komitmen yang tinggi terhadap keberlanjutan usaha kelompok. Implementasi pengarusutamaan gender masih belum optimal pada aspek komunikasi dan sumber daya.

Berdasarkan analisis dengan menggunakan empat variabel implementasi kebijakan George C. Edwards III (1980), ditemukan bahwa: (1) komunikasi sudah berjalan efektif untuk informasi operasional kelompok, namun belum mencakup komunikasi strategis mengenai nilai-nilai pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan secara lebih luas; (2) sumber daya masih terbatas, baik dari segi modal usaha, peralatan produksi, maupun pelatihan kewirausahaan dan pengembangan usaha yang berkelanjutan, yang berdampak pada terbatasnya kapasitas perempuan dalam mengembangkan inovasi dan daya saing usaha; (3) disposisi pelaksana telah berjalan dengan baik, ditunjukkan oleh motivasi tinggi, komitmen kuat, dan partisipasi aktif seluruh anggota perempuan dalam pengelolaan usaha dan pengambilan keputusan; dan (4) struktur birokrasi telah berjalan dengan baik, dengan pembagian tugas yang jelas (ketua, sekretaris, bendahara, anggota), mekanisme pelaporan periodik setiap tiga bulan, dan akses penuh perempuan terhadap semua posisi kepemimpinan tanpa hambatan struktural. Faktor penghambat utama implementasi pengarusutamaan gender adalah minimnya sosialisasi nilai kesetaraan gender secara strategis, kurangnya pelatihan responsif gender yang berkelanjutan, serta keterbatasan modal dan fasilitas untuk pengembangan usaha.

### **Saran**

1. Pemerintah kelurahan bersama pendamping sosial perlu memperkuat kapasitas anggota KUBE melalui pelatihan manajemen usaha, literasi keuangan, dan pemahaman kesetaraan gender agar perempuan tidak hanya berperan sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai pengambil keputusan.
2. Dinas Sosial dan pemerintah daerah disarankan menyusun pedoman pembinaan KUBE yang responsif gender, sehingga prinsip kesetaraan dapat terintegrasi dalam struktur organisasi dan mekanisme kerja kelompok.
3. Penelitian selanjutnya dapat memperluas fokus pada analisis kebijakan pemberdayaan perempuan di sektor lain atau membandingkan praktik pengarusutamaan gender antarwilayah untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

### **Ucapan Terimakasih**

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Kelompok KUBE SUGAMA atas dukungan dan kontribusinya dalam pelaksanaan penelitian ini. Dukungan berupa akses data, fasilitas penelitian, maupun izin penelitian sangat membantu kelancaran proses pengumpulan dan analisis data. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan maupun masukan berharga selama penelitian ini berlangsung.

### **Daftar Pustaka**

Abdurrahman, A., & Tusianti, E. (2021). Apakah pemberdayaan perempuan dalam ekonomi dan politik telah meningkatkan IPM perempuan Indonesia? *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 21(2), 204-219. <https://doi.org/10.21002/jepi.2021.13>

- Aprilianti, S., & Setiadi, Y. (2022). Faktor-faktor Yang Memengaruhi Indeks Pembangunan Gender di Indonesia Tahun 2020. *Seminar Nasional Official Statistics 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi. (2024). *Profil gender dan anak Kota Bukittinggi tahun 2024*. Bukittinggi: BPS Kota Bukittinggi.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indeks ketimpangan gender (IKG) Indonesia konsisten mengalami penurunan menjadi 0,421*. <https://www.bps.go.id>
- Dutametro. (2025, September 11). Wako Ramlan buka pelatihan advokasi dan evaluasi pengarusutamaan gender Kota Bukittinggi 2025. <https://dutametro.com>
- Firman, Dirwan, & Mariah. (2020). Dampak program kelompok usaha bersama (KUBE) terhadap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmiah Institute Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia*, 9(1), 1-9.
- Flick, U. (Ed.). (2018). *The SAGE handbook of qualitative data analysis*. London: SAGE Publications.
- Hill, M., & Hupe, P. (2024). *Implementing public policy* (4th ed.). London: SAGE Publications.
- Kementerian Keuangan RI. (2022). *Kajian Pengarusutamaan Gender: Analisis Ketimpangan Gender dan Strategi Pengarusutamaan Gender di Indonesia*. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal.
- Kementerian Sosial RI. (2024). *Kelompok usaha bersama (KUBE)*.
- Kertati, I. (2021). Analisis indeks pembangunan gender (IPG) dan indeks pemberdayaan gender (IDG) Kota Surakarta. *Public Service and Governance Journal*, 2(1), 1-11.
- Lubis, K. S., Winata, E., & Siregar, A. R. A. (2024). Pengembangan usaha melalui kelompok usaha bersama (KUBE) produsen tape di Medan Tuntungan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 1(1), 34-41. <https://doi.org/10.54099/jpma.v1i1.85>
- Marwanti, S., & Astuti, I. D. (2018). Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Melalui Pengembangan Kewirausahaan Keluarga Menuju Ekonomi Kreatif di Kabupaten Karanganyar. *SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 15(1), 9-20. <https://doi.org/10.20961/sepa.v15i1.48814>
- Muhartono, D. S. (2020). Pentingnya regulasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kediri. *Publiciana*, 13(2), 117-134. <https://doi.org/10.36563/publiciana.v13i2.175>
- Nurdin, N., Syahrir, S., & Akbar, M. I. (2024). Memahami isu gender dan ketidaksetaraan gender di Indonesia pasca era reformasi: Perspektif analisis kebijakan. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(1), 1054-1074.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2020). *Naskah Akademik Pengarusutamaan Gender Provinsi Jawa Tengah*. Semarang: Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Rahayu, W. K. (2016). Analisis pengarusutamaan gender dalam kebijakan publik (Studi kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah). *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 2(1), 93-108. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v2i1.1524>
- Ratnasari, S., Supriatna, I., & Sadikin, A. (2021). Pemberdayaan perempuan melalui pelatihan kewirausahaan menjahit di PKBM Bhina Swakarya. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 4(2), 123-131.
- Safitri, L. D., Hermanto, E. M., & Indrasetianingsih, A. (2020). Pemodelan Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender di Indonesia dengan Pendekatan Regresi Probit Biner Bivariat. *Jurnal Matematika, Statistika, dan Komputasi*, 16(2), 150-161.
- Susiana, S. (2015). Penerapan Konsep Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam Pembangunan Daerah (Studi di Provinsi Papua dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 6(1), 1-12. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v6i1.464>
- Utami, T. H., & Arif, M. (2023). Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Manusia Berbasis Gender di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(3), 622-630. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i3.2471>

- Veranita, M. (2023). Pemberdayaan pelaku UMKM perempuan dalam upaya peningkatan ketahanan ekonomi melalui pelatihan digital marketing. *Jurpikat (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 4(3), 388-401. <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v4i3.1461>
- Wibawa, B. (2023). Meningkatkan daya saing pengusaha perempuan melalui pelatihan mindset kewirausahaan dan literasi digital. *Jurpikat (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 4(3), 354-366. <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v4i3.1480>
- Yasin, H. (2015). Upaya strategis pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kelompok usaha bersama (KUBE). *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 38. <https://doi.org/10.26858/jiap.v5i1.1064>
- Yuniawati, Y., Rahmawati, P. I., & Susilowati, E. (2021). Pemberdayaan perempuan dalam membangun kemandirian ekonomi. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 5(1), 557-562. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v5i1.4861>